

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau beberapa orang (rumah tangga) dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar baik itu berupa makanan maupun non makanan yang di ukur dengan pengeluaran. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga ke dimensi, sosial, kesehatan, pendidikan dan politik (Kembar Sri Budhi, 2013). Kemiskinan juga merupakan salah satu isu yang diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, saat ini otoritas publik belum memiliki pilihan untuk menghadapi atau menangani isu-isu tersebut. Kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar penduduk miskin di Indonesia disebabkan karena pekerjaan yang mereka lakukan memiliki produktivitas yang rendah (Arndt dan Sundrum 2012).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2000 hingga tahun 2005 mengalami penurunan dari sebesar 19.14 persen menjadi 16.69 persen, kemudian pada tahun 2010 tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 13,33 persen dan pada tahun 2015 hingga tahun 2020 tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan dari 11.22 persen menjadi 10.19 persen. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi, maka dari itu pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terkoordinasi.

Kemiskinan masih menjadi masalah di semua negara, terutama Indonesia sebagai negara berkembang. Pemerintah telah melaksanakan program-program pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan, namun kemiskinan tetap menjadi masalah yang berkepanjangan. Saat ini pemerintah terus melakukan upaya besar untuk mengatasi kemiskinan, bahkan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia

Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2018-2020 (%)

Provinsi	Tingkat Kemiskinan di Indonesia		
	2018	2019	2020
Aceh	31,65	30,33	30,42
Sumatera Utara	18,16	17,46	17,89
Sumatera Barat	13,2	12,71	12,84
Riau	14,6	13,98	13,86
Jambi	15,77	15,11	15,55
Sumatera Selatan	25,62	25,27	25,64
Bengkulu	30,84	30,14	30,33
Lampung	26,15	24,92	25,1
Bangka Belitung	10,02	9,12	9,42
Kepulauan Riau	12,03	11,7	12,05
DKI Jakarta	7,12	6,89	9,22
Jawa Barat	14,7	13,73	16,31
Jawa Tengah	22,51	21,38	23,25
DI Yogyakarta	23,94	23,14	25,08
Jawa Timur	21,83	20,57	22,55
Banten	10,49	10,03	12,55
Bali	7,92	7,4	8,23
Nusa Tenggara Barat	29,38	28,44	28,2
Nusa Tenggara Timur	42,38	41,71	42,11
Kalimantan Barat	15,14	14,77	14,41
Kalimantan Tengah	10,27	9,79	10,08
Kalimantan Selatan	9,19	9,02	9,21
Kalimantan Timur	12,09	11,85	12,74
Kalimantan Utara	13,95	13,12	14,21
Sulawesi Utara	15,39	15,17	15,4
Sulawesi Tengah	27,7	26,66	25,98

Sulawesi Selatan	17,93	17,25	17,71
Sulawesi Tenggara	22,95	22,28	22,69
Gorontalo	32,64	30,83	30,81
Sulawesi Barat	22,47	21,97	22,37
Maluku	35,97	35,34	35,43
Maluku Utara	13,26	13,68	13,75
Papua Barat	45,67	43,68	43,07
Papua	55,17	54,08	53,44

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari segi persentase tingkat kemiskinan seperti terlihat pada tabel 1.1 Papua menjadi provinsi dengan persentase tingkat kemiskinan tertinggi, kemudian provinsi kedua dengan tingkat persentase kemiskinan tertinggi yaitu Papua Barat dan provinsi ketiga dengan tingkat persentase kemiskinan tertinggi yaitu NTT. Hal ini menunjukkan dibutuhkan upaya lebih keras serta inovasi dari pemerintah ketiga Provinsi tersebut maupun pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan agar kemiskinan dapat menurun secara konstan di setiap Provinsi di Indonesia.

Sebagaimana dikatakan oleh Nelson dan Leibstein (dikutip dari Sadono Sukirno, 1983), ada dampak hubungan langsung antara pertumbuhan penduduk dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan dengan kata lain nantinya saat jangka panjang penduduk miskin akan meningkat yang mana kesejahteraannya akan menurun. Pertumbuhan penduduk merupakan suatu fenomena yang pasti terjadi di suatu wilayah atau negara yang mana akan mempengaruhi jumlah penduduk dari waktu ke waktu.

Philip Hauser berpendapat bahwa kemiskinan disebabkan oleh tenaga kerja yang kurang optimal di tempat kerja karena ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti konflik dalam suatu

negara atau wilayah, keterbatasan infrastruktur, bencana alam, laju pertumbuhan penduduk serta umumnya banyak orang yang memasuki pasar kerja dan karena ketatnya persaingan dalam mencari pekerjaan, memaksa para pencari kerja untuk mencari pekerjaan secepat mungkin walaupun tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk di Indonesia Tahun 2018-2020 (%)

Provinsi	Laju Pertumbuhan Penduduk di Indonesia		
	2018	2019	2020
Aceh	1,77	1,71	1,56
Sumatera Utara	1,22	1,28	1,28
Sumatera Barat	1,27	1,25	1,29
Riau	3,29	3,58	1,4
Jambi	1,57	1,52	1,38
Sumatera Selatan	1,41	1,42	1,25
Bengkulu	1,65	1,63	1,55
Lampung	1,16	1,13	1,65
Bangka Belitung	1,37	1,33	1,29
Kepulauan Riau	2,95	2,9	2,02
DKI Jakarta	1,07	1,19	0,92
Jawa Barat	1,34	1,3	1,26
Jawa Tengah	0,59	0,56	0,54
DI Yogyakarta	1,18	1,18	-0,38
Jawa Timur	0,63	0,64	0,79
Banten	1,94	1,87	1,1
Bali	1,08	1,04	1,01
Nusa Tenggara Barat		1,13	1,63
Nusa Tenggara Timur	1,67	1,66	1,25
Kalimantan Barat	1,58	1,56	2,04
Kalimantan Tengah	2,11	2,05	1,84

Kalimantan Selatan	1,46	1,38	1,13
Kalimantan Timur	2,1	2,11	2,13
Kalimantan Utara	3,93	3,89	2,86
Sulawesi Utara	1,09	0,01	1,4
Sulawesi Tengah	1,49	1,45	1,22
Sulawesi Selatan	1,06	1,05	1,18
Sulawesi Tenggara	2,18	2,1	2,31
Gorontalo	1,59	1,45	1,16
Sulawesi Barat	1,85	1,82	1,98
Maluku	1,66	1,75	1,83
Maluku Utara	1,91	1,86	1,69
Papua Barat	6,25	2,66	-0,77
Papua	1,76	1,71	4,27

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari segi persentase laju pertumbuhan penduduk seperti terlihat pada tabel 1.2 pada tahun 2020 Papua menjadi provinsi dengan persentase laju tingkat pertumbuhan tertinggi yaitu 4,27% kemudian provinsi kedua dengan laju tingkat pertumbuhan tertinggi ialah Kalimantan Utara dengan persentase 2,86% dan provinsi ketiga dengan tingkat laju pertumbuhan tertinggi yaitu Sulawesi Tenggara dengan persentase 2,31%. Hal ini menunjukkan dibutuhkan upaya lebih keras serta inovasi dari pemerintah ketiga Provinsi tersebut maupun pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan agar kemiskinan dapat menurun secara konstan di setiap Provinsi di Indonesia. Pesatnya laju pertumbuhan penduduk yang harus diimbangi dengan peningkatan jumlah pemukiman. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak juga dibutuhkannya lahan pemukiman.

Tabel 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2018-2020 (%)

Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka		
	2018	2019	2020
Aceh	12,88	11,65	11,99
Sumatera Utara	11,16	10,96	11,62
Sumatera Barat	11,34	10,76	12,13
Riau	11,53	11,12	11,24
Jambi	7,29	7,58	9,39
Sumatera Selatan	8,35	8,55	9,41
Bengkulu	5,98	5,67	7,15
Lampung	8,36	7,98	8,93
Bangka Belitung	7,2	6,9	8,6
Kepulauan Riau	15,34	14,52	16,32
DKI Jakarta	12,38	12,04	16,1
Jawa Barat	16,45	15,82	18,17
Jawa Tengah	8,66	8,63	10,68
DI Yogyakarta	6,37	6,07	7,95
Jawa Timur	7,68	7,59	9,44
Banten	16,19	15,66	18,63
Bali	2,28	2,79	6,88
Nusa Tenggara Barat	6,86	6,43	7,26
Nusa Tenggara Timur	5,67	6,12	6,92
Kalimantan Barat	8,27	8,41	10,28
Kalimantan Tengah	7,05	7,25	7,91
Kalimantan Selatan	8,07	7,59	8,41
Kalimantan Timur	13,2	12,59	13,59
Kalimantan Utara	9,81	10,33	10,68
Sulawesi Utara	12,47	11,18	12,71
Sulawesi Tengah	6,49	6,57	6,7
Sulawesi Selatan	9,98	9,72	12,01

Sulawesi Tenggara	5,96	6,4	7,68
Gorontalo	7,08	7,01	7,57
Sulawesi Barat	5,34	4,27	5,71
Maluku	14,02	13,3	14,28
Maluku Utara	9,19	9,77	9,24
Papua Barat	12,72	12,24	13,58
Papua	5,75	6,73	7,7

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat diketahui tingkat persentase pengangguran setiap Provinsi di Indonesia kurun waktu tahun 2018-2020. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas terhadap tingkat pengangguran antar wilayah di Indonesia, dimana selama tiga tahun terakhir yaitu kurun waktu tahun 2018-2020, rata-rata tingkat pengangguran tertinggi disandang oleh Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 18,17 persen sedangkan untuk angka rata-rata tingkat pengangguran terendah disandang oleh Provinsi Bali yaitu sebesar 6,88 persen.

Kesejahteraan masyarakat dapat dengan mudahnya turun yang mana disebabkan oleh pengangguran efeknya daya beli masyarakat sudah pasti rendah sehingga mereka memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Masalah ini mewakili dampak dari pengaruh pengangguran pada kemiskinan. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya.

Pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapai (Subroto, 2012). Pengangguran itu sendiri dapat disebabkan oleh berbagai faktor sosial, termasuk pekerja yang kehilangan pekerjaan karena PHK di perusahaan atau pabrik. Pengangguran seringkali disebabkan oleh jumlah tenaga kerja atau pencari kerja

yang tidak proporsional dan jumlah lapangan pekerjaan yang ada yang dapat menyerap pengangguran. Berikut adalah tabel tingkat pengangguran menurut provinsi di Indonesia.

Tabel 1.4 Rata-rata Lama Sekolah di Indonesia Tahun 2018-2020 (tahun)

Provinsi	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas		
	2018	2019	2020
Aceh	9,09	9,18	9,33
Sumatera Utara	9,34	9,45	9,54
Sumatera Barat	8,76	8,92	8,99
Riau	8,92	9,03	9,14
Jambi	8,23	8,45	8,55
Sumatera Selatan	8	8,18	8,24
Bengkulu	8,61	8,73	8,84
Lampung	7,82	7,92	8,05
Bangka Belitung	7,84	7,98	8,06
Kepulauan Riau	9,81	9,99	10,12
DKI Jakarta	11,05	11,06	11,13
Jawa Barat	8,15	8,37	8,55
Jawa Tengah	7,35	7,53	7,69
DI Yogyakarta	9,32	9,38	9,55
Jawa Timur	7,39	7,59	7,78
Banten	8,62	8,74	8,89
Bali	8,65	8,84	8,95
Nusa Tenggara Barat	7,03	7,27	7,31
Nusa Tenggara Timur	7,3	7,55	7,63
Kalimantan Barat	7,12	7,31	7,37
Kalimantan Tengah	8,37	8,51	8,59
Kalimantan Selatan	8	8,2	8,29
Kalimantan Timur	9,48	9,7	9,77

Kalimantan Utara	8,87	8,94	9
Sulawesi Utara	9,24	9,43	9,49
Sulawesi Tengah	8,52	8,75	8,83
Sulawesi Selatan	8,02	8,26	8,38
Sulawesi Tenggara	8,69	8,91	9,04
Gorontalo	7,46	7,69	7,82
Sulawesi Barat	7,5	7,73	7,89
Maluku	9,58	9,81	9,93
Maluku Utara	8,72	9	9,04
Papua Barat	7,27	7,44	7,6
Papua	6,52	6,65	6,69

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas dapat diketahui rata -rata lama sekolah menurut Provinsi di Indonesia kurun waktu tahun 2018-2020. Provinsi yang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu 11,13 pada tahun 2020, sedangkan pada tahun yang sama Provinsi yang memiliki rata-rata lama sekolah terendah adalah Provinsi Papua yaitu 6,69.

Tingkat pendidikan sangat penting untuk pengembangan sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi kualitas sumber daya, dan sebaliknya. Kaitan antara kemiskinan dan pendidikan sangat kuat, karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang melalui perolehan pengetahuan dan keterampilan. Keadilan dalam memperoleh pendidikan harus diperjuangkan dan seharusnya pemerintah berada di garda terdepan untuk mewujudkannya. Berikut adalah tabel tingkat pendidikan di setiap Provinsi.

Tabel 1.5 Dana Zakat di Indonesia Tahun 2018-2020 (rupiah)

Provinsi	Jumlah Penerimaan Zakat di setiap Provinsi		
	2018	2019	2020
Aceh			
Sumatera Utara	4.645.412.167	6.570.050.369	9.931.671.982
Sumatera Barat			
Riau			
Jambi			
Sumatera Selatan			
Bengkulu			
Lampung			
Bangka Belitung	10.385.691.470	12.139.280.715	
Kepulauan Riau			
DKI Jakarta		33.291.011.127	85.510.443.069
Jawa Barat	24.014.611.477	24.673.563.257	15.267.501.181
Jawa Tengah			
DI Yogyakarta	4.221.744.777	4.748.909.678	4.370.112.384
Jawa Timur			
Banten			
Bali			
Nusa Tenggara Barat			
Nusa Tenggara Timur			
Kalimantan Barat			
Kalimantan Tengah			
Kalimantan Selatan	2.022.945.006	7.328.504.182	6.430.198.141
Kalimantan Timur			
Kalimantan Utara			
Sulawesi Utara			
Sulawesi Tengah			

Sulawesi Selatan			
Sulawesi Tenggara	903.140.598	1.023.302.418	960.312.599
Gorontalo			
Sulawesi Barat			
Maluku			
Maluku Utara			
Papua Barat			
Papua			

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.5 Penerimaan dana zakat tertinggi diperoleh Provinsi DKI Jakarta pada periode 2019-2020 dengan jumlah zakat sebesar Rp. 85.510.443.069 Posisi tertinggi kedua pada tahun yang sama ditempati oleh Jawa Barat dengan jumlah zakat sebesar Rp. 15.267.501.181 dan posisi tertinggi ketiga yaitu Sumatera Utara dengan jumlah zakat sebesar Rp. 9.931.671.982.

Zakat dapat membuat kegiatan ekonomi masyarakat semakin hidup. Oleh karena itu, semakin tinggi zakat yang kita keluarkan, semakin tinggi Pendapatan Nasional kita dan negara kita akan semakin sejahtera. Fakta sejarah membuktikan bahwa zakat dapat meningkatkan pendapatan nasional suatu negara hingga tercipta kemakmuran.

Pada masa Umar bin Abdul Aziz perlu dicontoh dalam sistem pemerintahannya, terutama yang berkaitan dengan zakat dan sistem perpajakan. Selain itu, baik teori konseptual maupun empiris memahami bagaimana zakat sebenarnya dapat membantu menanggulangi masalah Perekonomian di Indonesia salah satunya merupakan Kemiskinan.

Tabel 1.6 Dana Infak/Sedekah di Indonesia Tahun 2018-2020 (rupiah)

Provinsi	Jumlah Penerimaan Infak/Sedekah di setiap Provinsi		
	2018	2019	2020
Aceh			
Sumatera Utara	995.255.866	1.853.979.641	596.998.223
Sumatera Barat			
Riau			
Jambi			
Sumatera Selatan			
Bengkulu			
Lampung			
Bangka Belitung	640.097.149	153.943.008	
Kepulauan Riau			
DKI Jakarta		8.719.198.266	26.585.285.383
Jawa Barat	1.242.652.572	2.432.320.524	837.204.368
Jawa Tengah			
DI Yogyakarta	1.117.635.529	1.216.448.382	1.096.580.378
Jawa Timur			
Banten			
Bali			
Nusa Tenggara Barat			
Nusa Tenggara Timur			
Kalimantan Barat			
Kalimantan Tengah			
Kalimantan Selatan	2.277.021.309	2.253.404.682	3.387.269.304
Kalimantan Timur			
Kalimantan Utara			
Sulawesi Utara			
Sulawesi Tengah			
Sulawesi Selatan			

Sulawesi Tenggara	493.074.516	533.131.252	742.962.219
Gorontalo			
Sulawesi Barat			
Maluku			
Maluku Utara			
Papua Barat			
Papua			

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tabel 1.6 menunjukkan bahwa penerimaan dana infak/sedekah tertinggi diperoleh Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah infak/sedekah sebesar Rp. 26.585.285.383. Kemudian, diposisi kedua tertinggi pada tahun yang sama yaitu Kalimantan Selatan dengan jumlah infak/sedekah sebesar Rp. 3.387.269.304. Dan posisi tertinggi ketiga yaitu D.I Yogyakarta dengan jumlah infak/sedekah sebesar Rp. 1.096.580.378.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 215. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah : “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”

Allah Tabaraka wata’ala berfirman (di dalam Hadits Qudsi) : "Hai anak Adam, infaklah (nafkahkanlah hartamu), niscaya Aku memberikan nafkah kepadamu" (HR. Muslim). Dalam hadits riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya sedekah itu memadamkan murka Allah dan menolak mati jelek (su’ul khotimah).” (HR Thabrani).

Islam terdapat berbagai instrumen yang mampu menjawab dan mengentaskan permasalahan kemiskinan beberapa diantaranya yaitu berupa zakat, infak dan sedekah. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Pertumbuhan

Penduduk, Pengangguran, Pendidikan dan Dana ZIS Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia)”.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar permasalahan di atas maka persoalan penelitian yang ingin dipecahkan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan Pertumbuhan Penduduk, Pengangguran, Pendidikan, Dana Zakat, Infak dan Sedekah terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pengangguran, Pendidikan, Dana Zakat, Infak dan Sedekah terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui perkembangan Pertumbuhan Penduduk, Pengangguran, Pendidikan, Dana Zakat, Infak dan Sedekah terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2016-2020.
2. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pengangguran, Pendidikan, Dana Zakat, Infak dan Sedekah terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2016-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, penelitian ini akan memberikan tambahan wawasan tentang studi kemiskinan, pertumbuhan penduduk, pengangguran dan pendidikan. Disisi lain menambah pengalaman di bidang penelitian.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk menambah wawasan pembaca dan juga sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan para pengambil kebijakan guna mengentaskan kemiskinan di Indonesia.